

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Hanawi Asmawie, 1992, “Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP”, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 2000, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004 “Pokok-pokok Hukum Acara Perdata”, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Khodin, 2007, “Mengenal Figur Polisi Kita”, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, “Hukum Acara Pidana Kontemporer”, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Munawan, 2012, “Teknik Penyusunan Putusan”, Diklat Tidak Diterbitkan, Tulungagung.
- M. Yahya Harahap, 2009, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1998, “Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum”, cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Tim Pengajar, 2010, “Hukum Acara Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Jurnal, Skripsi dan Tesis :

M.D. Oostinga, Ellen Giebels, and Paul J. Taylor, 2017, “*Communication Error Management in Law Enforcement Interactions: A Receiver’s Perspective*”, *Psychology, Crime & Law* 24 No. 2. Oktober.

Stefan Machura et al., 2019, “*Recognizing Modern Slavery*”, *Journal of Human Trafficking* 5 No. 3, Juli.

Sugeng, 2013, “*Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*”, Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha, 1 Februari.

Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN/Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian Menteri Keuangan Republik Indonesia

Lain-lain :

LBH Jakarta, 2018, “Pengamen Korban Salah Tangkap Ajukan Sengketa Non Litigasi”, Pers Rilis Nomor : 850/SK-RILIS/VIII/2018.

Kemenkumham, 2016, “Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan (Puu) Melalui Jalur Non Litigasi Terkait Korban Salah Tangkap”,

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3463:sidang-&lang=en, diakses pada 29 Desember 2022.

Faktapers, 2019, “Siksa Korban Salah Tangkap, Polda Metro Digugat 4 Pengamen Cipulir”, <https://faktapers.id/2019/07/siksa-korban-salah-tangkap-polda-metro-digugat-4-pengamen-cipulir/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

